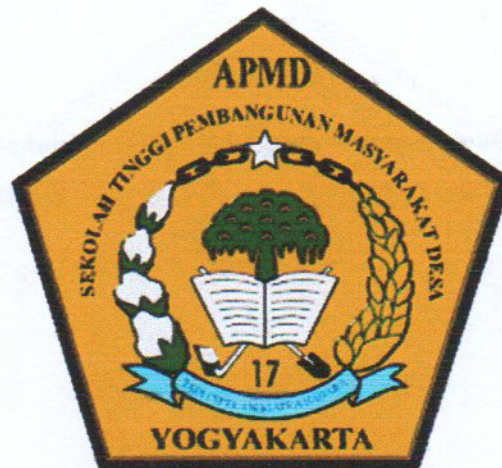


SKRIPSI

**SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DESA**

**(Studi Penelitian Deskriptif di Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk
Kabupaten Gunungkidul)**



Disusun Oleh:

**FRANSISKUS KANDA
17520297**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023



**SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

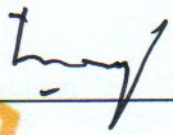
Hari : Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

Jam : 13.30-15.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

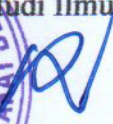
TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji Samping I	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II	



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Kanda

Nim : 17520297

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “(SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DALAM MENINGKATKA PENDAPATAN ASLI DESA)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03-11-2022

Yang Membuat Pernyataan



Fransiskus Kanda
NIM. 17520297

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Kanda

Nim : 17520297

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “(SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DALAM MENINGKATKA PENDAPATAN ASLI DESA)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03-11-2022

Yang Membuat Pernyataan

Fransiskus Kanda

NIM. 17520297

MOTTO

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui”

-Aristotle Onassis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa, selaga cinta kasihmu, segingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan dalam studi akademik ini langkah awal untuk berjuang segala hal apapun yang dipertjuangkan. Dengan ini saya mempersembahkan untuk keluarga:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua yang telah berjuang dengan saya sampai akhir ini bisa menyelesaikan studi akademik, bapak Piro Jaka Dana dan ibu Regina Rendi Mete, kaka Modesta Maghu Ate dan adik-adik saya: Petrus Jaha Kola, Marten Danga Ole, Damianus Radu Bani, Anastasia Ambu kaka, Anjelita Kalli Ghoba, Ignasius Ndara Bengo, Oktavianus Kaka
2. Sahabat seperjuangan yang saya sangat cintai yang selaku memberikan semangat dan doa, Agus Pangga, Paul Bokol, Marsel Tanggu, Riku, Fiba, Veni, Tinus Momo, Ady Bany, Frengko, Vian, Boming, Ronal, Simson, Fandy, Selo, Okta, Lewun, Nelis, Agmon, Handri, Ramon, Silva, Danto, Frengky, Lukas, Yanto Dawa, Agop.
3. Keluarga besar sumba APMD yang tidak sebut satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi.
4. Keluarga Mahasiswa Katolik Sumba KMKS yang telah mendukung saya sampai selesai skripsi.
5. Teman Fron mahasiswa nasional FMN yang telah mendukung dan mendorong, Bung Herka, Jhosua, Noldy, Servas cester. Ergen, Afrin.
6. Terima kasih Almamater tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala sudut syukur Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan segala rahmat dan berkatNya, sehingga dengan kasih setiaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sinergitas Pemerintah Kalurahan Dan Badan Usaha Milik Kalurahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”**. Tugas akhir skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memenuhi gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam menuliskan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran membaca, sehingga dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar dapat menjadi lebih baik di kemudian hari.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini merupakan sebuah dari bantuan dari pihak lain berupa bimbingan, saran, nasehat serta dukungan moral maupun material sangat membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Rijal Samaloisa, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi;

4. Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan materi kuliah yang lebih khususnya Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
5. Seluruh Staf dan Karyawan/Karayati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
6. Pemerintah Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patut, Kabupate GunungKidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Masyarakat Nglanggeran yang sudah meluangkan waktu melakukan wawancara.

Dengan hati yang tulus dan ikhlas, semoga Tuhan Yang Maha Esa mmembalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini.

Akhir kata, sebesar harapan penulis agar karya kecil ini dapat berguna bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan ilmu dalam hasil penelitian ini.

Yogyakarta, November 2023

Penyusun,

Fransiskus Kanda
NIM. 17520297

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Literature Review	9
F. Kerangka Konseptual	13
1. Sinergitas	13
2. Pemerintah Desa	17
3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	19
4. Pendapatan Asli Desa (PADes)	24
G. Ruang Lingkup Penelitian	25
H. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Unit Analisis	26
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisis Data	28
BAB II PROFIL KALURAHAN NGLANGGERAN	31
A. Sejarah Desa	31
B. Kondisi Geografis	33
C. Kondisi Demografis	35
D. Mata Pencaharian	36

E. Sosial Budaya	37
F. Sarana Prasarana	38
1. Prasarana dan Saran Transportasi	38
2. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	38
3. Prasarana dan Sarana BUM Desa	39
4. Prasarana dan Sarana Pendidikan	39
5. Sarana dan Prasarana Olah Raga	40
G. BUNgkal “Tunas Mandiri” Kalurahan Nglanggeran.....	42
1. Struktur organisasi BUNgKal	42
2. Unit Usaha yang Dilakukan oleh BUM Desa	42
3. Model Awal Saat Dirikan BUM Desa	43
4. Kondisi BUM Desa saat ini	43
I. Keadaan Ekonomi.....	44
1. Pertanian Dan Tenaman Pangan	44
2. Peternakan.....	45
J. Kondisi Lembaga Pemerintahan.....	46
1. Struktur Pemerintahan Kalurahan.....	46
2. Pembagian Wilayah Kalurahan.....	47
BAB III SINERGITAS PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN	
USAH MILIK KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN	
ASLI DESA.....	48
A. Sinergitas Pemerintah Kalurahan BUM Des Desa	48
B. Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Desa	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64
DOKUMENTASI.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Informan	26
Tabel 2. 1	Profil Kalurahan	32
Tabel 2. 2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Satuan Ha (Hektare)	34
Tabel 2. 3	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 2. 4	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 2. 5	Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	36
Tabel 2. 6	Agama Penduduk	37
Tabel 2. 7	Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	38
Tabel 2. 8	Prasarana dan Sarana BUM Desa.....	39
Tabel 2. 9	Sarana Prasarana Pendidikan	39
Tabel 2. 10	Sarana Prasarana Kesehatan.....	40
Tabel 2. 11	Prasarana Olah Raga Kalurahan Nglanggeran.....	41
Tabel 2. 12	Prasarana Ibadah Kalurahan Nglanggeran.....	41
Tabel 2. 13	Jenis Produksi Tanaman Pangan.....	44
Tabel 2. 14	Tanaman Buah	44
Tabel 2. 15	Jenis Peternakan.....	45
Tabel 2. 16	Pembagian Wilayah Kalurahan.....	47
Tabel 2. 17	Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Desa.....	51
Tabel 2. 18	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pnggaran pendapatan dan Belanja Desa.....	52

INTISARI

Sinergisitas antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) seperti mesin motor yang bergerak bersama menuju tujuan bersama karena kepentingan ekonomi desa berjalan lurus dengan sinergitas kolaboratif antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat melalui BUM Desa. Hal ini juga terkait dengan konsep ketata-pemerintahan yang baik, dimana relasi antara berbagai komponen masyarakat desa, kelompok kepentingan desa, dan pemerintah desa menjadi kunci terwujudnya kepentingan bersama menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis di tingkat lokal desa.

Penelitian ini menggunakan jenis diskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi-kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivesme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, digunakan untuk ini adalah sebagian instrumen kunci, teknik pengumpulan data dikalukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data pasti.

Berdasarkan hasil penelitian maka penelitian menyimpulkan bahwa sinergitas pemerintah kalurahan dan Badan Usaha Milik Kalurahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dalam usah yang disediakan ada tiga, *pertama*, unit usaha sembako; *kedua*, pengelolaan sampah; *ketiga*, simpan simpan, dengan unit usaha ini sudah berjalan, walapun belum maksial dari pendapatan, tetapi sudah berjalan dengan usahanya.

Kata kunci: Sinergitas Pemerintah Kalurahan dan Banda Usaha Milik Kalurahan

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi harapan baru bagi desa. Babak baru ini sangat dirindukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa dan pemangku kepentingan desa lainnya. Jika sebelumnya desa hanya menjadi domain pemerintah daerah atau dengan kata lain objek pemerintah pusat, sekarang desa mempunyai domain tersendiri dengan otonomi desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara menjamin, melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur sejahtera (Sutoro Eko, dkk. 2017).

Kondisi otonomi desa yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan desa sebagai ranah untuk bereksplorasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai konsep kebijakan yang dirumuskan melalui proses demokrasi (musyawarah-mufakat) desa itu sendiri.

Sinergisitas antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) seperti mesin motor yang bergerak bersama menuju tujuan bersama karena kepentingan ekonomi desa berjalan lurus dengan sinergitas kolaboratif antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat melalui

BUM Desa. Hal ini juga terkait dengan konsep ketata-pemerintahan yang baik, dimana relasi antara berbagai komponen masyarakat desa, kelompok kepentingan desa, dan pemerintah desa menjadi kunci terwujudnya kepentingan bersama menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis di tingkat lokal desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, mengamanatkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa dengan demikian merupakan wadah bagi semua aktivitas ekonomi Desa. Pendirian BUM Desa telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: pasal 87, 88, 89 dan 90.

Sementara itu penjelasan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM

Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaannya berfungsi membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, menggerakkan roda perekonomian di desa, melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa, dijelaskan bahwa BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dengan cara mengelola potensi yang terdapat dalam desa, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pengembangan usaha masyarakat juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa, menjelaskan bahwa modal untuk lembaga BUM Desa berasal dari; pemerintah desa; tabungan masyarakat (swadaya); bantuan

pemerintah (pemerintah provinsi/daerah/kota); pinjaman, dan/atau; kerjasama usaha dengan pihak lain (pemodal).

Selain itu, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh desa yang bertujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas dalam masyarakat, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan usaha lainnya guna untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, maka unit usaha dalam BUM Desa merupakan milik badan usaha milik desa yang tentu untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah pada bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang berbadan hukum dan melaksanakan fungsi dan tujuan pendirian BUM Desa.

Dalam berbagai kajian perekonomian desa, yang tidak boleh dilupakan adalah kondisi modal sosial (*social capital*) masyarakat desa yang sudah sangat kuat. Masyarakat desa mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong-royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Walau di satu sisi, kekayaan modal sosial berbanding terbalik dengan modal ekonomi. Modal sosial masyarakat desa terdiri atas ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Dari ketiga aspek tersebut, ikatan sosial masyarakat desa yang bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling dangkal yang tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, mewujudkan desa yang bertenaga sosial, dan berdemokrasi lokal (Eko et al., 2014).

Untuk membebaskan ikatan sosial yang terbatas tersebut perlu ada gerakan kemandirian masyarakat desa. Selain memperkuat modal sosial, desa juga harus memperkuat modal ekonomi (*financial capital*), modal pengetahuan (*knowledge capital*), dan modal kemanusiaan (*human capital*) (De Massis et al., 2015).

Dengan telah dimilikinya modal dasar yaitu modal sosial, ditambah dengan modal ekonomi yang disokong oleh anggaran dana desa langkah selanjutnya adalah pembangunan modal pengetahuan dan kemanusiaan atau dengan kata lain peruntukan hasil usaha BUNGKAl bagi masyarakat, apabila modal-modal tersebut setelah terpenuhi maka seharusnya dapat menjadi landasan konsep untuk dipraktekkan menjadikan BUNGKAl berdikari meningkatkan laba untuk pendapatan asli desa dan dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi dilokasi Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul sebagai tempat penelitian, bahwa BUNGKAl “Tunas Mandiri” dikalurahan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2017 dengan modal yang diberikan oleh pemerintah kalurahan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan pulu juta lima ratus rupiah) yang berasal dari dana desa. Dana ini sebagai awal modal awal untuk memperkuat ekonomi desa dengan membangun salah satu unit usaha sembako. Meskipun demikian unit usaha sembako tersebut belum begitu berjalan secara maksimal dikarenakan belum memiliki fasilitas seperti tempat atau gedungnya. Demikian juga untuk wisata dikelola oleh BUM Desa dalam bentuk kemitraan atau kerja sama

dengan pihak pemerintah kabupaten, kalurahan dan BUNGKal. Kemudian di pengolahan sampah sebagai unit Badan Usaha Milik Kalurahan (BUNGKal) dana disuntik oleh pemerintah desa sebesar Rp15.000.000,00 dari tahun 2018 sebagai kontribusi pemerintah desa ke BUNGKal dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga di unit koperasi simpan pinjam yang sudah berjalan sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk memberikan akses modal usaha masyarakat ataupun para pelaku usaha dikalurahan Nglanggeran. Dari unit usaha yang dijalankan oleh BUNGKal Tunas Mandiri dapat meningkatkan pendapatan asli desa (APDesa) yang dimana pendapatan BUM Desa akan disetor ke pemerintah desa sebesar Rp12.132.000,00 dalam bentuk bagi hasil dengan pemerintah kalurahan dan BUM Desa.

Hasil keuntungan BUM Des pada tahun 2018 sebesar 25.000.000,00 dengan hasil keuntungan ini dibagi hasil dengan pemerintah kalurahan, untuk meningkatkan pendapatan asli desa, dan yang untuk biaya operasional dalam kegiatan BUM Des.

Namun dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pengembangan BUM Desa sebagai basis ekonomi masyarakat Desa sampai saat ini masih banyak kendala, dalam artian BUM Desa tidak sediakan tempat atau gedung dalam usaha sembako, hanya sewa tempat atau gedung untuk usaha sembako dan itu salah satu kendala. Pengelolaan keterlibatan para pemangku kepentingan, regulasi dukungan dan supra pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dari publikasi audit data pemerintah desa, PADesa hanya sebesar Rp25.352.000,00 dengan hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Rp12.13,000,00 dan hasil aset desa Rp11.220.000,00. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Kalurahan Nglanggeran Kaponewon Patuk. Unit usaha tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dan apabila pendapatan PADes bisa meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas pemerintahan desa, dan meningkatkan perencanaan penganggaran pembangunan di tingkat desa dengan memberdayakan masyarakat, menanggulangi kemiskinan masyarakat desa. Akan tetapi kurang profesional dalam pengelolaan sehingga tidak berkembang dengan baik. Dari tahun ke tahun tidak dirasakan adanya perubahan signifikan dari sisi pengembangan atau sarana dan prasarana yang seharusnya lebih ditingkatkan untuk menjangkau wisatawan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengurus BUM Desa sangat mempengaruhi keberhasilan tugas BUM Desa dalam mengelola obyek potensi Desa Nglanggeran tersebut. Hubungan yang bersifat sinergitas antara pengurus BUM Desa dengan pemerintah desa dalam hal ini Pemerintah Kalurahan Nglanggeran kurang optimal.

Berdasarkan uraian yang di atas menunjukkan bahwa sinergitas antara Pemerintah Desa dan BUM Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan utama dari dibentuknya BUM Desa, yaitu untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Menjadikan BUM Des sebagai roda perekonomian ditingkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan konsumsi warga desa dengan harga murah, mendukung pengembangan usaha warga dengan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses

produksi dan pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan renternir, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Melihat fenomena tersebut, tertarik untuk meneliti tentang “Sinergitas Pemerintah Desa dan BUM Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”, mengingat kontribusi pemerintah desa sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan BUM Desa yaitu memperkuat ekonomi desa.

Berdasarkan penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui tentang sinergitas pemerintah desa dan BUNGGal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Maka latar belakang tersebut menggunakan *governance*. *Governance* sebagai kerangka dasar yang dipahami cara tata kelola pemerintahan yang baik dimana pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai sudut pandang pengelolaan lain dengan hubungan antara berpihak lainnya, pemerintah membangun relasi antara masyarakat atau pihak lain untuk bekerjasama supaya mencapai tujuan bersama dengan keinginan pemerintah desa itu sebagai gagasan atau ideal menurut (Sutoro Eko 2003).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Kalurahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Nglanggeran, Kapenewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas Pemerintah Desa dan BUM Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Nglanggeran, Kapenewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu dalam bidang Ilmu Pemerintahan secara khusus kajian mengenai pemerintahan Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan sinergitas pemerintah desa.
- b. Harapan lainnya adalah penelitian ini dapat dijadikan wadah pembelajaran bagi siapa saja dalam memperdalam bidang Ilmu Pemerintahan Desa.

E. Literature Review

Berdasarkan penelitian sejumlah peneliti sebelumnya terkait dengan Sinergitas Pemerintah Desa dan BUM Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam perspektif *governmentability*, baik penelitian tentang

keberhasilan maupun tentang kegagalan dalam Sinergitas Pemerintah Desa dan BUM Desa dalam spepektif *governmentability* dilakukan oleh:

1. Dino Leonandri 1, Maskarto Lucky Nara Rosmadi “Sinergitas Desa Wisata Dan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat” Ikraith Ekonomika STP Trisakti Jakarta, STIE Kridatama Bandung Jl. IKPN Tanah Kusir Bintaro, Jakarta Selatan Jl. Terusan Borobudur No. 1-4 (depan TVRI) Cibaduyut Bandung. Bulan November 2018. Hasil penelitian di atas, maka dapat diuraikan bahwa Desa Wisata Palalangan memberikan dampak positif bagi destinasi wisata baru dan hal ini sangat mendukung industri kreatif yang sudah ada berupa indsutri makanan ringan. Namun demikian masih ada kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah terutama pembinaan cara mengelola desa wisata dan pembinaan terhadap pelaku industri kreatif serta bantuan permodalan dari perbankan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peran pemerintah dan perbankan sangat dibutuhkan bagi pengembangan desa wisata dan industri kreatif agar lebih memiliki daya saing yang dapat diandalkan bagi masyarakat sekitar.
2. Amelia Sri Kusuma Dewi “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADaes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”. *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di desa. Tetapi sayangnya kedudukan BUM Desa

belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUM Desa.

3. Sentosa Sembiring, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 39, Nomor 1, April 2017. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa secara yuridis formal diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai sumber Pendapatan Asli Desa. Setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa.
4. Muhammad Farid Ma’ruf, Badrudin Kurniawan, Rizky Purna Aji Galih Pangestu. “Desa Wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”. *Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN “Veteran” Jatim*. Volume 7 Nomor 2 Oktober 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dimana lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subjek penelitian. Hasil penelitian pemerintah desa telah bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menata ulang dan menggali obyek-obyek wisata yang sebelumnya belum ada sehingga dapat dikunjungi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

5. Made Sara, Komang Adi Kurniawan Saputra, Anak Agung Ketut Jayawarsa. “Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”<http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier> *SEI Economic Review* Vol.III, No. 2, September 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kerobokan sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan, BUM Desa berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa sehingga pemerintah desa dapat menyelenggarakan pembangunan yang berdampak pada perekonomian desa dan strategi yang dijalankan pemerintah desa lebih mengedepankan koordinasi dan kerjasama.
6. Sarja, sarjahampar2@gmail.com. “Sinergitas Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Membangun Ekonomi Desa”. *Jurnal Madaniyah*, Volume 10 Nomor2 Edisi Agustus 2020. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan instrumen untuk pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi masyarakat Desa Bukateja dengan pemerintah desa melihat ada sumber alam yang dimiliki Desa Bukateja untuk dikembangkan menjadi desa wisata sehingga bisa memberdayakan ekonomi bagi masyarakat desa dan sudah terlihat hasilnya, seperti, pengangguran berkurang, mampu mengentaskan kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja bagi warga desa setempat.

7. Muhammad Mujtaba Habibi. "Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Riwayat Artikel: Diterima: 28 Februari 2022 Disetujui: 17 Juni 2022. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pengembangan desa wisata meliputi pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana dan pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa jurnal di atas bahwa pemerintah desa mempunyai peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak melihat sumber pendapatan pemerintah desa dalam kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga dari jurnal di atas melihat dari ketenaga kerjaan. Maka dari itu perlu meliti tentang kinerja pemerintah desa dan masyarakat yang berhubungan dengan pendapatan desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

F. Kerangka Konseptual

1. Sinergitas

Pada penelitian ini kerangka konseptual berfokus dengan menguji sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pada bagian pertama, akan

melakukan tinjauan pustaka terhadap studi-studi yang sudah ada dan kaitan.

Sinergitas berasal dari bahasa Yunani yaitu *synergos* yang berarti bekerja sama-sama. Sinertigas adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang cermat sehingga bisa menghasilkan suatu optimum. Menurut Doctoroff (1977) penciptaan sinertigas dapat menjadi di dalam hubungan sinergi dengan beberapa syarat utama yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas.

Adapun sinergi dapat konteks komunikasi, Menurut Dedi Mulyana (20018) adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka memtuskan pekerjaannya dengan baik dan penuh kegembiraan. Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan dari pada sikap yang aptis. Sinergitas berbeda dengan kompromi, karena kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerjasama.

Sinergitas dapat dibangun rasa kepercayaan, ada rasa keterbukaan, kerjasama yang baik individu untuk membentuk sebuah kreatifitas guna menemukan pemecahan masalah atau ide baru dala alternatif tanpa menimbul konflik sosial dengan individu lain. Sinergitas dapat terjadi dalam beberapa faktor dalam organisasi maupun kelompok. Hubungan

sinergitas dapat berkembang dan mengalir antara individu, kelompok dengan bekerja bersama secara terus menerus atau dengan kata lain sehingga diantara mereka dapat berpikir dan bergerak sebagai satu kesatuan.

Hal yang ditulis oleh (Najiyati, dkk 2011) menyatakan bahwa sinergitas sebagai kombinasi atau panduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran atau output lebih baik dan besar. Sinergitas dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas muncul ketika bagian-bagian organisasi saling berintraksi menghasilkan dampak gabungan yang lebih besar daripada apabila dilakukan sendiri oleh masing-masing bagian. Agar mencapai kondisi yang sinergi atau demi menghasilkan output yang jauh lebih baik, tidak dihindari dapat terdapat tingkat kebergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Menurut KBBI, sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar dari pada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang dihasilkan dan bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih baik maksimal dan efisien.

Dalam konteks ini, sinergitas dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu satu dengan yang lain ataupun kelompok satu dengan kelompok yang lain untuk bekerjasama menuju pada keinginan bersama atau satu tujuan. Sinergitas antara pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tingkat desa melingkupi fungsi untuk pengontrol urusan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa dengan cara mendirikan badan usaha milik desa, setelah dibentuk kemudian fungsi kontroling itu tetap berlangsung keduanya berkolaborasi untuk memanfaatkan sumberdaya yang sudah ada di desa baik manusia dan alam dikelola agar menghasilkan keuntungan. Indikator terlaksananya kerjasama antar Pemerintah Desa dengan pengurus BUM Desa.

Kegiatan sinergitas merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai kegiatan yang dijalankan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergitas merupakan hasil dari suatu relasi antara Pemerintah Desa dan pengurus BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, maka merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Mampu dikatakan bahwa untuk menghasilkan kualitas sinergitas pemerintah desa yang diperlukan suatu perilaku kerjasama yang merupakan konsekuensi dari semangat berkelompok atau kebersamaan. Semangat berkelompok ini menjadi produktif, bila anggota kelompok bersifat kritis (penting), karena mereka selalu mencari yang hal-hal yang baru dan inovatif. Bahkan, semangat berkelompok ini akan semakin

meningkat, bila anggota kelompok berja keras, tuntas, dan berorientasi pada kualitas, yang didukung oleh pihak lain. Untuk itu menjalankan Pemerintah Desa dan BUM Desa untuk peningkatan pendapatan asli desa (PADes) perlu adanya komunikasi baik, koordinasi dan sinkronisasi.

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 1 Ayat (2) pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa

kewenangan desa meliputi; kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak Asal-usul, dan adat istiadat desa. Artinya pemerintah Kalurahan Nglanggeran memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mendayagunakan sumber daya manusia maupun alam untuk merealisasikan program-program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Nglanggeran.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat. Sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kalurahan, kapanewon, kabupaten, provinsin dan pemerintah pusat.

Dari beberapa pernyataan di atas. Bahwa fungsi Pemerintah Desa adalah untuk menjalankan aspirasi masyarakat dan juga menjalankan tugas pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

a. Pembentukan BUM Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat BUM Desa, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal kekayaan desa yang dipisahkan guna meningkatkan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan BUM Desa suatu badan usaha yang sumber modalnya berasal dari pemerintah desa secara sistematis dalam pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUM Desa telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 87, 88, 89 dan 90. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BMU Desa yang mendirikan dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, ayat (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 88 ayat (1) pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa, (2) pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 mengatur hasil usaha BUM Desaa dimanfaatkan untuk (a) Mengembang usaha

(b) Pembangunan desa, (c) Pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong pembanguana desa dengan (a) memberikan hibah dan akses pemodalalan, (b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan (c) memprioritaskan BUM Desa dalam meningkat sumberdaya alam di desa.

Pada pasal 9 menyatakan BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Dan Pada pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sinergi dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terdiri dari penasehat, pelaksanaan operasional dan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Lembaga Usaha Desa yang pendiriannya melalui Musyawarah Desa dengan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan sinergitas dan memperkuat ekonomi Desa. BUM Desa sebagai Badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan pemerintah desa yang menganut asas mandiri dan harus mengutamakan perolehan modalnya yang berasal dari pemerintah desa, meskipun demikian tidak menutup

kemungkinan BUM Desa memperoleh modal dari pihak luar seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan bahkan pihak ke-3, baik berupa hibah murni maupun perjanjian yang selanjutnya diatur di perundang-undangan, susunan inti organisasi BUM Desa terdiri dari penasehat yang secara sistematis dijabat oleh kepala desa, pelaksana operasional perorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa dan pengawas pembentukan BUM Desa, dalam meningkatkan sinergis dan aset desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. yang hasil usaha dari BUM Desa dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun mekanisme pembentukan BUM Desa dilakukan melalui tahap-tahap:

- 1) Rembuk Desa/musyawarah Desa untuk menghasilkan kesepakatan
- 2) Kesepakatan dituangkan kedalam AD/ART yang sekurangnya berisih: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem tanggung jawab, dan laporan, bagi hasil dan kepalitan
- 3) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan; dan
- 4) Penerbitan peraturan Desa.

b. Tujuan Pendirian BUNGKAl

Tujuan BUNGKAl seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa meningkatkan perekonomian desa;

- 1) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa
 - 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam meningkatkan potensi ekonomi desa;
 - 3) Mengembangkan rencana kerjasama antara desa atau pihak ketiga;
 - 4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - 5) Membuka lapangan pekerja;
 - 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan;
 - 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa
- berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat disimpulkan pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya BUM Desa yang mampu mengembangkan setiap potensi desa baik aset desa, jasa atau unik usaha lainnya, BUM Desa didorong untuk mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang nantinya berdampak baik pada peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa.

c. Prinsip Peningkatan BUM Desa

Untuk meningkatkan pendapatan BUM Desa. Desa dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari pengurus BUM Desa dengan mekanisme keanggotaan dasar *self help* yang dijadikan secara profesional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUM Desa diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasarnya dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Penjelasan prinsip dalam meningkatkan sinergitas BUM Desa sebagai berikut:

- 1) Kooperatif: semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan kelangsungan hidup lainnya.
- 2) Partisipatif: semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
- 3) Emansipatif: semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparansi: aktivitas yang mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- 5) Akuntabel: seluruh kegiatan usaha harus dapat ditanggungjawabkan secara teknis atau administrasi.
- 6) Sustainabel: kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi Desa adalah memperkuat kerja sama, menjalin kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat Desa, BUM Desaa, dan Pemerintah Desa sehingga menjadi daya dorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Sumber pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) secara khusus untuk desa.

- 1) Hasil usaha desa
- 2) Hasil kekayaan desa
- 3) Hasil swadaya partisipasi
- 4) Hasil gotong royong dan lain-lainnya pendaptan asli desa.

Berdasarkan uraikan di atas ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha dan kekayaan desa, swadaya dan pertisipasi, dan gotong royong serta lain-lainnya pendapatan asli desa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batas penelitian yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar berjalan sesuai dengan yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan penelitian ini, supaya data dan informasi yang diambil sesuai dengan yang menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu, penelitian akan diruanglingkupkan pada 2 hal yaitu:

1. Sinergitas Pemerintah Kalurahan dengan BUNGKAl:
 - a. Saat pembentukan BUNGKAl
 - b. Pembinaan yang dilakukan pemerintah kalurahan terhadap pengelola BUNGKAl
 - c. Modal yang diberikan
 - d. Jenis Usaha dalam BUNGKAl
2. Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi-kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivesme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, digunakan untuk ini adalah sebagian instrumen kunci, teknik pengumpulan data dikalukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami

makna, memahami keunikan mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data pasti. Data pasti adalah yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut, (Sugiyono, 2017:9)

2. Unit Analisis

Metode yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik kualitatif. Yang menjadi informan.

Tabel 1. 1
Data Informan

No	Nama	Umur (tahun)	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan/ jabatan
1	Widada	54	SMA	Lurah
2	Trinyanta	38	SMA	Jagabaya
3	Ahmad Nasrodin	39	S1	Direktur BUM Desa
4	Nastri	37	SMA	Danarta

Sumber: Data Lapangan Peneliti Juli 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data yang dipergunakan dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini pengumpulan data melalui:

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistimatis dari obyek penelitian sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan (Sutrisno Hadi, 1984:136). Dengan demikian teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung kelokasi penelitian sebelum penelitian dilaksanakan tentang sinergitas Pemerintah Kalurahan dan BUM Desa Nglanggeran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, karya-karya monumental dari perseorangan. Dokumen yang terbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dokumen yang dibentuk gambar atau foto, gambar hidup dan lain dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah kehidupan di masa kecil, di sekolah atau tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subjektif, (Sugiyono, 2017:124).

c. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer* sedangkan orang yang diwawancara disebut *interviewee*. Teknik wawancara sangat penting dalam penelitian untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi pandangan/persepsi yang ada dalam pikiran peneliti atau etik peneliti dengan berusaha untuk mencari tahu pandangan dari subjek yang diteliti atau pandangan etik. Dengan teknik ini, peneliti akan berusaha untuk menemukan data atau informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan informan yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat meminimalisir munculnya pandangan etik dalam mendeskripsikan objek yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistimatiskan untuk dilakukan analisis. Teknik yang digunakan dalam menganalisis adalah kualitatif interpretatif. Interpretatif adalah sebuah metode penelitian yang membahas mengenai konsep teoritik yang mengarah tindakan, penuturan manusia dan lingkungan sosial budaya.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai Sinergitas Pemerintah Kalurahan dan BUNGKAl dalam Meningkatkan Pendaptan Asli Kalurahan. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan dilakukan melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah membetuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil atau merupakan suatu proses untuk menyimpulkan data yang didapatkan dari tempat penelitian, kemudian ditarik kesimpulannya, agar peneliti lebih muda menganalisis data tersebut.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini data dijadikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif.

d. Menguji Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *persistent observasion* (observasi berlanjut), *triangguasi*, maupun pemeriksaan sejawab melalui diskusi.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *trianggulasi* yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data pengamatan dengan data wawancara, contoh dengan hasil pengamatan misalnya dalam penelitian dilapangan bahwa hasil wawancara sudah sesuai data palingan dan dari narasumber.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang menjadi dengan apa dikatakan secara pribadi;
- 3) Membandingkan apa dikatakan oleh masyarakat tentang situasi;
- 4) penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian;
- 5) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, dan orang berada dan juga orang pemerintahan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN NGLANGGERAN

A. Sejarah Desa

Sejarah awal berdirinya desa Nglanggeran pada masa kerutunan Ronggowarsito sekitar ke-17, dimana kala itu Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda banyak perang di daerah untuk membebaskan dari tekanan penjajahan Belanda. Politik Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa juga sampai hingga Kerajaan Mataram. Berbagai macam cara dilakukan sehingga terjadi suatu diplomasi yang tertulis dalam Perjanjian Gianti. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada masa itu Manguntirto yang merupakan anak dari Ronggowarsito melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Manguntirto juga memiliki saudara bernama Sojoyo yang menjadi Bupati Gantiwarna Klaten. Pada saat melawan Belanda, Manguntirto menggunakan strategi topeng atau kecerdasan sehingga tidak dikenali oleh Belanda pada saat setiap kali membunuh pasukan-pasukan penjajah. Dan setiap kali habis membunuh tentara Belanda, Manguntirto lari ke goa atau bebatuan besar yang jauh dari lokasi dia membunuh tentara Belanda. Manguntirto selalu lolos dari belanda karena persembunyian beliau tidak pernah ditemukan oleh pasukan Belanda. Sehingga suatu hari Manguntirto ini akhirnya dijadikan perkampungan tersebut banyak orang yang datang dan

menetap, hal ini diketahui oleh pihak Keraton Ngayogyakarta, sehingga diangkat Manguntirto menjadi Bekel.

Seiring berjalannya waktu Manguntirto tertarik kepada seorang gadis dan gadis tersebut dijadikannya seorang istri. pernikahannya tersebut dikaruniai satu orang laki-laki yang bernama Sutodipo dan 2 orang anak perempuan. Menurut sumber sejarah Manguntirto dan sang istri menetap di daerah yang berbeda. Manguntirto dan anak lelakinya tinggal di Planggeran dan istrinya menetap di daerah Ngleri bersama dua orang perempuannya. Saat dewasa anak dari Manguntirto yakni Sutodipo memiliki kelebihan sehingga ia menjadi kepala Desa Planggeran yang sangat disegani. Pada masa pemerintahan Sutodipo nama Desa Planggeran diubah menjadi Desa Nglanggeran. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kepemimpinan Desa Nglanggeran sudah berapa kali berganti pemimpin.

Pendiri atau penemu Nglanggeran ialah Manguntirto, pemimpin selanjutnya:

Tabel 2. 1
Profil Kalurahan

1	Sutodipo
2	Ranurejo
3	Harjo dentono
4	Harjo suwito
5	Hartono (tahun 19xx-2004)
6	Senen (tahun 2004-2014)
7	Surimin. Spd (penjabat Kepala Desa tahun 2014-2015)
8	Senen (tahun 2015-2021)
9	Widada (tahun 2021-sekarang)

Sumber: <http://nglanggeran-patuk.desa.id/index.php/first/artikel/57>

B. Kondisi Geografis

Desa Nglanggeran merupakan desa yang secara administratif yang terletak di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Gunung Api Purba memiliki luas 48 ha. Sedangkan wilayah Desa Nglanggeran memiliki luas 760,0990 ha. Wilayah Desa Nglanggeran memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Ngoro-Oro
- Sebelah Selatan : Desa Patuk
- Sebelah Timur : Desa Ngleri
- Sebelah Barat : Desa Salam

Jarak Desa Nglanggeran dari ibukota kecamatan 4 km, dari ibukota kabupaten jarak 22 km dan sedangkan dari kota provinsi berjarak 25 km.

Desa Nglanggeran berdiri dari 5 dusun/pedukuhan yaitu Pedukuhan Karangsari, Pedukuhan Doga, Pedukuhan Nglanggeran Wetan, Pedukuhan Kulon dan Pedukuhan Gunungbatuk. Pusat pemerintahan desa terletak di Pedukuhan Doga.

Luas wilayah Desa Nglanggeran 762,0990 ha, yang terdiri dari wilayah untuk lahan sawah/pertanian, perkebunan, ladang/tegalan, permukiman dan lain-lain. Dari luas wilayah masing-masing tersebut, setiap pedukuhan yang tersebar mempunyai karakteristik tersendiri yang membawa dampak baik bagi masyarakat Desa Nglanggeran demi meningkatkan dan pemberdayaan berbagai hal positif tersebut untuk menjadi sumber daya pangan serta mata pencaharian bagi masyarakat dengan berbagai bentuk jenis pekerjaan aktivitas wilayah masing-masing.

1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan

Luas wilayah Desa Nglanggeran 762,0990 ha, yang terdiri dari lahan tahan sawah, lahan tanah kering, lahan basah, lahan tanah perkebunan, fasilitas umum, lahan tanah hutan. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel berikutnya:

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Satuan Ha (Hektare)

No	Tanah Sawah	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi teknis	14,68
2	Sawah irigasi ½ teknis	8,03
3	Sawah tadah hujan	62,67
	Total luas	85,38
	Tanah Kering	
1	Tega/ladang	110,36
2	Permukiman	112,51
3	Pekarangan	48,17
	Total luas	271,04
	Tanah Perkebunan	
	Tanah perkebunan perorangan	110,11
	Total Luas	110,11
	Tanah Fasilitas Umum	
1	Kas desa/kalurahan	20,52
2	Tanah bengkok	20,52
3	Lapangan olah raga	8,80
4	Perkantoran pemerintah	0,25
5	Tempat pemakaman desa/umum	0,80
6	Tempat pembuangan sampah	0,50
7	Bangunan sekolah/penguruan tinggi	1,00
8	Jalan	4,15
	Total Luas	28,02
	Tanah Hutan	
1	Hutan konservasi	68,00
2	Hutan rakyat	200,25
	Total Luas	268,25

Sumber: Profil Kalurahan Nglanggran 2022-2022.

Dari tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa luar tahan sawah 85,38 Ha Luas tanah kering 271,04 Ha Luas tanah basah 0,00 Ha Luas tanah perkebunan 110,11 Ha Luas fasilitas umum 28,02 Ha Luas tanah hutan 268,25 Ha total keseluruhan luas lahan yaitu 762,80 Ha, jika dilihat dari tabel yang di atas penggunaan lahan di Kalurahan Nglanggeran masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah Kalurahan Nglanggeran, sekitar luas lahan yaitu: 271,04 Ha sedangkan yang telah digunakan untuk lahan pertanian perkebunan, sawah tadah hujan, sawah irigasi, sawah pasang surut sejumlah: 85,38 Ha, dan untuk fasilitas umum cukup banyak yaitu untuk bangunan sekolah, perkantoran, kas desa/kalurahan, lapangan olah raga, perkantoran pemerintah, tempat pemakaman desa/kalurahan umum, jalan sejumlah: 28,02 Ha.

C. Kondisi Demografis

Berdasarkan data profil Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, jumlah penduduk kepala keluarga (KK) 906, kepadatan penduduk 360,91 per km.

Tabel 2. 3
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	1.374
2	Perempuan	1.379
Jumlah		2.753

Sumber: Profil Kalurahan Kalurahan Tahun 2022)

Dari tabel yang di atas ini, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki berjumlah 1374 orang dan perempuan berjumlah 1379 orang, sehingga total penduduk Kalurahan Nglanggeran sebesar 2753 orang.

Tabel 2. 4
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tamat TK	137
2	Tamat SD/ sederajat	446
3	Tamat SLTP/ sederajat	451
4	Tamat SLTA/ sederajat	504
5	Tamat DI / sederajat	0
6	Tamat D2/ sederajat	11
7	Tamat D3/ sederajat	15
8	Tamat S1/ sederajat	51
9	Tamat S2/ sederajat	0
10	Tamat S3/ sederajat	0
Total		1.615

Sumber: Profil Kalurahan Kalurahan Tahun 2022,

Dari tabel yang di atas ini, dapat dilihat bahwa menunjukkan jumlah tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Nglanggeran, yang lebih tamat SLTA yang berjumlah 504 sederajat.

D. Mata Pencaharian

Tabel 2. 5
Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	796
2	Buruh Migran	17
3	Pegawai Negeri Sipil	20
4	Peternak	353
5	Polri	2
6	Karyawan Perusahaan Swasta	248
Jumlah		1.436

Sumber: Profil Kalurahan Kalurahan Tahun 2022.

Dari tabel yang di atas ini, dapat melihat bahwa Kalurahan Nglanggeran merupakan tingkat masyarakat yang cukup produktif, dengan berjumlah mata pencaharian sebagai besar terdiri dari petani, buruh migra, pegawai negeri sipil, peternak, Polri, karyawan perusahaan swasta, berjumlah sebesar 1.436 jiwa.

E. Sosial Budaya

Penduduk Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya yang tingkat Pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk di Kalurahan Nglanggeran tersebut adalah sebagai agama Islam yang lebih banyak.

Tabel 2. 6
Agama Penduduk

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1.	Islam	2.700
2.	Kristen Proestan	9
3.	Katholik	44
Jumlah		2.753

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglanggeran 2022.

Tabel yang diatas ini dapat dilihat, bahwa Kalurahan Nglanggeran memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kalurahan Nglanggeran. Mayoritas masyarakat Nglanggeran beragama Islam meskipun begitu, tidak ada diskriminasi antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat terdapat umat Kristen, umat Katholik.

F. Sarana Prasarana

1. Prasarana dan Saran Transportasi

- a. Prasarana transportasi darat panjang jalan 5.700.000 Km dan kondisi jalan rusak 8,00 Km.
- b. Sarana transportasi dapat, panjang jalan ada 2700 unit
- c. Prasarana transportasi laut/sungai ada 9.6 unit pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran penting pemerintah sebagai mobilisatir pembangunan sangat strategi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi desa Nglanggeran.

2. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

Tabel 2. 7
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

No	Prasaran Air Bersih	Jumlah
1	Sumur pompa	0
2	Sumur gali	91
3	Hindran umum	0
4	Pah	50
5	Tengki air bersih	5
6	Embun	1
7	Mata air	36
8	Bangunan pengolahan air bersih/ air minum	0

No	Sanitasi	Jumlah
1	Saluran drainase/saluran pembangunan air bersih	1
2	Sumur resapan air rumah tanggah	63
3	Jumlah MCK umum	24
4	Pemilik jumlah jamban keluarga (KK)	837
5	Kondisi saluran drainase/saluran pembangunan air limbah	2

Sumber: Profil Kalurahan Kalurahan Tahun 2022.

Dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan yang sangat penting dalam menurunkan angka penderitaan penyakit, khususnya yang berhubungan air bersih, dan berperan penting dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Di kalurahan sudah menyediakan prasarana air bersih berupa sumur gali, PAM, embun, mata air.

3. Prasarana dan Sarana BUM Desa

Tabel 2. 8
Prasarana dan Sarana BUM Desa

No	BUM Desa
1	Memilik kantor/gedung/menumpang
2	Kepengurusan
3	Buku administrasi
4	Jumlah kegiatan

Sumber: Profil Kalurahan Kalurahan Tahun 2022.

4. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Tabel 2. 9
Sarana Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Gedung (unit)
1	Gedung TK	3
2	Gedung SD/sederajat	3
3	Gedung tempat pemain anak	3
4	Perpustakaan desa/kalurahan	1
Jumlah		10

Sumber: Data Profil Desa/Kalurahan Nglanggeran 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa sarana dan prasarana pendidikan seperti TK, gedung tempat bermain anak-anak dan perpustakaan desa/kalurahan sudah memadai. Berdasarkan data, tidak

terdapat gedung SMA, dan SMA. Data penduduk Kalurahan Nglanggeran berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 2.3 maka perlu adanya perhatian terhadap pendidikan dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai bagi para siswa-siswi.

Tabel 2. 10
Sarana Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Gedung/unit
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	6
Jumlah		7

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglanggeran 2022.

Berdasarkan tabel di atas ini dapat dilihat bahwa di Kalurahan Nglanggeran sarana prasarana di bidang kesehatan sudah cukup baik. Karena terdapat puskesmas dan posyandu jadi masyarakat Nglanggeran bisa berobat di puskesmas terdekat.

5. Sarana dan Prasarana Olah Raga

Sarana prasarana olah raga menjadi salah satu bagian penting yang tidak terlepas dsri aktivitas keseharian masyarakat pada umumnya, baik dalam pengembangan bakat maupun dalam menjaga stamina agar butuh tetap sehat dan dapat sebagai wadah untuk berkumpul bersama. Adapun sarana prasarana olahraga yang dimiliki Kalurahan Nglanggeran hingga saat ini antara lain: lapangan sebak bola berjumlah 2, dan lapangan voli berjumlah 4. Berikut dapat disajikan secara rinci dalam bentuk tabel.

Tabel 2. 11
Prasarana Olah Raga Kalurahan Nglanggeran

No	Prasarana	Jumlah
1	Lapangan sepak bola	2
2	Lapangan bola tangkis	8
3	Meja pimpong	2
4	Lapangan volli	4

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglanggeran 2022.

Tabel 2. 12
Prasarana Ibadah Kalurahan Nglanggeran

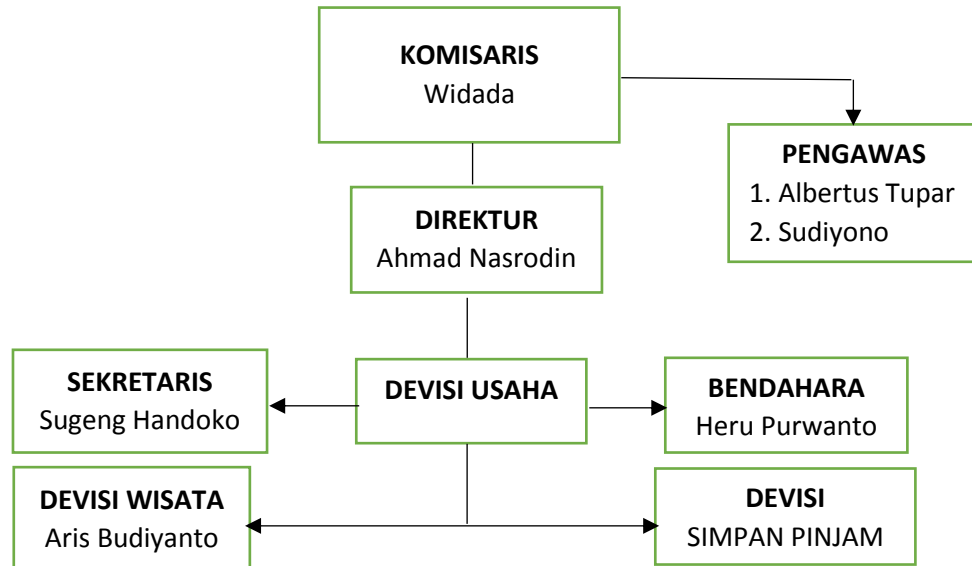
No	Tempat ibadah	Jumlah (unit)
1	Masjid	9
2	Mushola	9
3	Gereja katolik	1
Jumlah		19

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglanggeran 2022.

Dari tabel yang di atas ini, dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana prasarana peribadatan Kalurahan Nglanggeran untuk penduduk yang beragama Islam sudah cukup memadai. Akan tetapi, penduduk yang beragama lain seperti Khatolik, sudah memiliki sarana prasarana peribadatan.

G. BUNGkal “Tunas Mandiri” Kalurahan Nglanggeran

1. Struktur organisasi BUNGKal



Sumber: Infomasi

2. Unit Usaha yang Dilakukan oleh BUNGKal

BUNGKal “Tunas Mandiri” Kalurahan Nglanggeran memiliki beberapa unit usaha diantaranya, sembako, kemitraan wisata, pengelolaan sampah, simpan pinjam, ini merupakan unit usaha yang memberikan dengan tujuan untuk membantu perekonomian kalurahan,

- a. Unit usaha BUM Desa sembako yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Unit usaha ini belum memiliki tempat atau sarana yang memadai sehingga masih kontrak atau sewah tempat jualan.

- b. Kemitraan Desa Wisata Nglanggeran, kelompok swadaya yang berasal dari masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di Kalurahan Nglanggeran.
- c. Unit usaha pengelolaan sampah yang dikelola oleh BUM Desa “Tunas Mandiri” Nglanggeran
- d. Unit usaha ini meeberikan layanan simpan pinjam kepada masyarakat Kalurahan Nglanggeran dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat.

3. Modal Awal Saat Dirikan BUNGKAl

Modal awal didirikan BUNGKAl Kalurahan Nglanggeran sebesar Rp 85.000,000,00, untuk buka peluang mengelola potensi desa, dan awal pertamanya membuka unit asaha sembako dan memang belum punya tempat jualan, hanya sistim sewa atau dikontrak untuk penjualan sembako, kalau di wisata tidak butuh model lagi karena sistim kemintraan istilah pelayan atau hanya komando, dan karena belum punya tempat unit usaha sembako bisa dikatakan belum maksimal dengan hasil, dengan tujuan BUM Desa untuk kesejahteraan masyarakat dan fungsi sosial atau komersial.

4. Kondisi BUNGKAl saat ini

Kondisi BUNGKAl saat ini masih banyak kendala karena unit usaha Sembako belum memilik tempat toko hanya sewa atau dikontrak, karena BUM Desa belum bisa membangun toko sendiri, dengan kendala lain dari sumber daya manusia begitu minim.

I. Keadaan Ekonomi

Sumber perekonomian masyarakat Kalurahan Nglanggeran dari sektor pertanian dan swasta, ada pula peternakan, perikanan dan kerajinan. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Nglanggeran sangat terdampak positif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian.

1. Pertanian Dan Tanaman Pangan

Untuk melihat berbagai populasi tanaman yang ada di Kalurahan Nglanggeran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 13
Jenis Produksi Tanaman Pangan

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton)
1	Jagung	38,14	4,50
2	Kacang Kedelai	2,50	1,20
3	Umbi-Umbian	54,13	1,40
4	Kacang Tanah	16,26	0,50
5	Padi Sawah	85,92	4,25

(Sumber: Data Profil Kalurahan Nglanggeran 2022)

Bersadarkan tabel yang ini, dapat dilihat bahwa lahan peruntukan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan cukup besar. Terutama dalam usaha tanaman jagung, kacang kedelai, umbi-umbian, padi sawah.

Tabel 2. 14
Tanaman Buah

No	Jenis buah	(Ha)	Hasih panen (Ton)
1	Manga	1,33	10,90
2	Rambutan	15,70	0,35
3	Durian	70,00	20,00

4	Sawo	0,15	0,15
5	Pisang	24,63	0,00
6	Kelengkeng	1,20	0,12
7	Sirsak	0,26	0,26
8	Kedondong	0,07	0,01
9	Melinjo	2,54	0,25
10	Nanas	0,07	0,01

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglanggeran 2022.

Berdasarkan tabel yang di atas dapat dilihat bahwa lahan diperuntukkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan cukup besar. Terutama dalam usaha tanaman jagung, kacang kandelai, umbi-umbian, kacang tanah, padi sawah dan juga tanaman buah-buah mangga, rambutan, durian, sawo, pisang, kalengkeng, sirsak, kedondong, malinjo, nanas. Namun di sisi lain lahan perkebunan dimiliki oleh warga atau setiap keluarga yang memiliki lahan perkebunan. Karena memanfaatkan lahan secara produktif dapat menunjang ekonomi masyarakat dan dengan kondisi geografis dan iklim yang baik dapat meningkatkan hasil produktifitas pertanian dan perkebunan. Penghasilan dari tanaman pangan dan buah-buah menjadi penghasilan yang sangat besar di dalam bidang pertanian.

2. Peternakan

Jenis peternakan yang ada di Kalurahan Nglanggeran dapat disajikan dalam tabel:

Tabel 2. 15
Jenis Peternakan

No	Jenis ternak	Jumlah Pemilik (orang)	Jumlah (ekor)
1	Sapi	418	521
2	Angsa	4	66

3	Ayam kampung	732	7830
4	Jenis ayam broiler	16	238500
5	Bebek	3	42
6	Kambing	495	905

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglanggeran 2023.

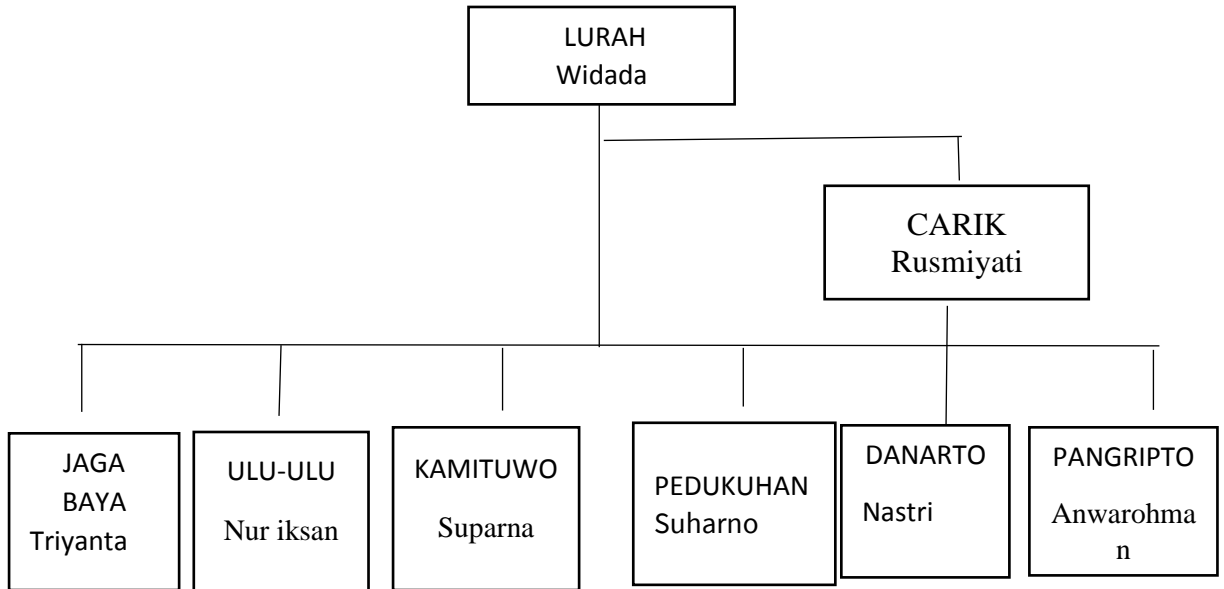
Populasi ternak pada tabel di atas ini dapat dilihat bahwa jumlah ternak paling dominan adalah jenis ayam broiler, terus disusul ayam kampung, kambing, sapi angsa, bebek. Dengan jenis peternakan yang banyak menunjukkan bahwa Kalurahan Nglanggeran merupakan kalurahan ternak. Dengan jumlah ternak sapi ayam mencapai 521 dapat kembangkan sehingga dari sapi- sapi tersebut dapat dimanfaatkan untuk produksi susu sapi, ini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat Kalurahan Nglanggeran.

J. Kondisi Lembaga Pemerintahan

1. Struktur Pemerintahan Kalurahan

Kalurahan Nglanggeran dipimpin oleh seorang Lurah yang dibantu oleh beberapa pamong yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Secara umum kondisi struktur Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: Infomasi Kalurahan Nglanggeran

2. Pembagian Wilayah Kalurahan

Tabel 2. 16
Pembagian Wilayah Kalurahan

No	Pedukuhan
1	Karangsari
2	Doga
3	Nglanggeran Kulon
4	Nglanggeran Wetan
5	Gunungbatuk

Sumber: Profil Kalurahan Nglanggeran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab per bab dapat disimpulkan dengan terkait sinergitas pemerintah desa dan BUNGKAl dalam meningkatkan pendapatan asli Kalurahan, di Kalurahan Nglanggeran, dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan desa maupun kebutuhan masyarakat Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dari ini dapat disimpulkan:

1. Pembentukan BUNGKAl

Proses dalam pembentukan pengurus BUNGKAl melalui musyawarah atau mufakat (muskal), dengan bertujuan untuk mencari yang punya kemampuan pengelola BUNGKAl supaya bisa berjalan dengan harapan oleh pemerintah Kalurahan atau masyarakat pada umumnya.

2. Pembinaan yang dilakukan pemerintah kalurahan terhadap BUNGKAl.

Pemerintah kalurahan belih mengarah untuk mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan BUNGKAl, dan apabila pengurus kurang profesional mengelola BUNGKAl, maka pemerintah kalurahan membina pengurus BUNGKAl, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Model yang diberikan, sebesar Rp 85.000.000,00 tahun 2017 dengan mengelola BUNGKAl, unit usaha yang sediakan BUM Desa ada tiga

sembako, simpan pinjam dengan adanya BUNGKAl berkontribusi terhadap pemerintah kalurahan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Kalurahan Nglanggeran.

4. Jenis unit usaha dalam BUNGKAl, ada tiga unit yang pertama sembako yang kedua simpan pinjam dan yang ketiga pengelolaan sampah, Kalurahan Nglanggeran.
5. Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan, laporan tahun 2018 pendapatan asli desa sebesar Rp 40.128.700,00, hasil usaha desa sebesar Rp 25.729.700,00, bagi hasil BUM Desa Rp 25.729.700,00, lain-lain pendapatan asli desa Rp 14.400,00, hasil pengutan desa Rp 2.400.000,00, lain-lain pendapatan asli desa Rp 12.000.000,00, data yang disampaikan ini dari laporan tahun 2018

B. Saran

Dengan adanya BUNGKAl ini memberikan manfaat bagi pemerintah Kalurahan Nglanggeran, mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian kebutuhan dan mengoptimalkan energi desa, meningkatkan perekonomian dan bisa mengatasi masalah yang ada di BUM Desa, dengan harapannya untuk ke depan BUNGKAl sebagai ekonomi lokal harus mampu meningkatkan pendapatan BUNGKAl supaya menjawab dengan kebutuhan masyarakat Nglanggeran, karena hakekatnya BUNGKAl untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Pembentukan BUNGKAl, mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian kebutuhan dan mengoptimalkan energi desa,

2. Pembinaan yang dilakukan pemerintah kalurahan terhadap BUNGKAl, pemerintah kalurahan sebagai penasehat BUNGKAl harus memberikan idukasih terhadap pengurus BUNGKAl supaya keinginan masyarakat bisa tercapai, meningkatkan pendapatan asli Kalurahan. Pemerintah Kalurahan Nglanggeran.
3. Model yang diberikan, sumber dari pendapatan asli Kalurahan, berupa kekayaan desa dan BUNGKAl harus benar mengelola potensi yang ada di desa, Kalurahan Nglanggeran.
4. Jenis unit usaha dalam BUNGKAl, sembako, simpan pinjam, pengelolaan sampah, dengan adanya unit ini harapannya BUM Desa mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan diprioritaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sutoro Eko, 2014. *Desa membangun indonesia. Titin Istiwatun Khasanah, Dyah Widuri, Cuci Handayyani, Nink, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan.*

Sutrino Hadi, 1984, *Metodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit Face Psikologi UGM, Yogyakarta.

Sugiyona. 2017, *Memahami Penelitian Kualitas*. Bandung CV. Alfabeta

Jurnal

Dino Leonandri I. Maskarto Lucky Nara Rasmadi. *Sinergitas Desa wisata dan industri kreatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. STP Trisakti Jakarta, STIE Kridatama Bandung Jl. IKPN Tanah Kusir Bintaro, Jakarta Selatan Jl. Terusan Borobudur No. 1-4 (depan TVRI) Cibaduyut Bandung E-mail: dinoleonandri @stptrisakti. ac.id1, maskartolucky@gmail.com Bulan November 2018*

Deddy Mulyana. Jurnal Dr. Redi Panuju, M.Si. 2018:46 *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi Komunikasi Sebagai Kegiatan Komunikasi Sebagai Ilmu*

Doctoroff, Michael. (1977) *Synergistic Management*. New York, AMACOM Press.

Hastowiyono Suharyanto, 2014. *Pelebagaan BUM Desaa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*

[https:// Desategalrejo.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/109-](https://Desategalrejo.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/109-)

Najiyati, et all, *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro), Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie, 2011*

Made Saral, Komang Adi Kurniawan Saputra², Anak Agung Ketut Jayawarsa³. *Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk Meningkatkan pembangunan Ekonomi PeDesaan. http://jurnal. iseibandung.or.id/index.php/ierSEI Economic Review Vol.III, No. 2, September 2019.*

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Untuk melengkapi data-data setiap informan yang akan diwawancarai oleh peneliti, maka peneliti Menyusun item sebagai tanda pengenal identitas dari informan sebagai berikut:

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pendidikan :
- d. Pekerjaan :

Daftar Pertanyaan

A. Proses badan usaha milik desa (BUM Desa)

1. Bagaimana badan usaha milik desa (BUM Desa) mendorong kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pemerintah desa membagikan konsep BUM Desa agar dapat meningkatkan PADesa?
3. Bagaimana pemerintah desa menjawab tantangan sumberdaya manusia?
4. Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan BUM Desa?
5. Usaha dan upaya apa saja yang dilakukan BUM Desa?

B. Pengorganisasian

1. Bagaimana struktur pengurusan pembinaan tugas dalam BUM Desa?
2. Apa saja yang menjadi kendala pengorganisasian pengelolaan BUM Desa?

C. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

1. Bagaimana proses BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa?
2. Bagaimana pengaruh BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
3. Pedapatan BUM Desaa dalam per tahun?
4. Apa yang manjdai kendala meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
5. Apa yang menjadi sulosi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?

DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan Bapak Widada selaku Kepala Kalurahan



Foto wawancara dengan Bapak Nasrudin selaku di Rektur BUNGKAL



Foto wawancara dengan Bapak Triyanta selaku Jagabaya



Foto wawancara dengan Ibu Nastri selaku Danarto



Foto wawancara dengan mas Hendri selaku masyarakat



Foto wawancara dengan mas Budi selaku masyarakat